

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas publik mendorong wadah sektor publik, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah semakin kokoh untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Pemerintah daerah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan memahami prinsip-prinsip ketepatan waktu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Salah satu instansi pemerintah yang wajib membuat laporan keuangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu instansi/perangkat pemerintah daerah yang menjalankan fungsi eksekutif agar penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan tepat. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan laporan keuangan tahunan dengan tepat, karena laporan keuangan yang baik merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Menurut Ernawati dkk (2019) laporan keuangan yakni catatan informasi keuangan untuk perusahaan atau bisnis tertentu selama periode akuntansi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau bisnis. Media bagi entitas, dalam hal ini pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan menjadi sebuah entitas pelaporan. Untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan dapat dikatakan lengkap apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat

karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dengan menerapkan kriteria tersebut pada laporan keuangan yang dihasilkan dan disajikan, pemerintah daerah dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu wilayah. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja anggaran, arus kas, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas entitas pelaporan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pengguna dalam membuat dan menilai sebuah keputusan (Tawaqal & Suparno, 2019).

Kualitas dari pelaporan posisi keuangan bagi pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah sistem informasi akuntansi (SIA). Keberhasilan suatu organisasi/instansi pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana organisasi/instansi pemerintah tersebut menggunakan keunggulan teknologi sistem informasi yaitu memberikan kemudahan penggunaan, yang pada akhirnya berdampak pada hasil kinerja organisasi /instansi pemerintahan itu sendiri. Dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi publik, sistem informasi akuntansi yang dimiliki juga harus efektif (Rouf & Mukti, 2021). Salah satu sistem informasi yang digunakan dalam suatu organisasi/instansi pemerintah adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Animah dkk (2020) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti individu dan peralatan yang didedikasikan untuk transformasi data keuangan dan data lainnya menjadi suatu informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut disampaikan kepada pembuat keputusan.

Sistem informasi akuntansi mengukur sejauh mana tujuan dicapai dengan menggunakan seperangkat fasilitas yang diatur dengan akumulasi sumber daya yaitu mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data secara elektronik yang kemudian diolah menjadi informasi bermanfaat dengan menyajikan laporan formal yang diperlukan baik dari segi kualitas maupun waktu, laporan tersebut dapat menjadi acuan dalam proses membuat opsi keputusan bagi suatu wadah atau

perusahaan. Secara umum, tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi lebih menekankan pada pengurangan kesalahan pemrosesan transaksi manual dan memberikan laporan keuangan yang akurat dan cepat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat suatu keputusan.

Faktor pendukung kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *good governance*. Perkembangan ekonomi dan teknologi merupakan sebuah acuan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan *good governance*, wadah sektor publik baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Saat ini pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan peraturan. Perubahan tersebut mendukung suatu pemerintah daerah agar dapat mewujudkan *good governance*. Dengan adanya penerapan *good governance* yang baik di wadah sektor publik baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, masyarakat mengharapkan laporan keuangan yang disajikan akan lebih berkualitas. Mereka juga berharap dengan menerapkan *good governance* yang baik, pemerintah akan lebih peduli pada kepentingan rakyat dan juga dengan harapan tingkat korupsi akan lebih (Agung & Mulyani, 2020).

Good governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan sebuah wujud dari keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Suatu wadah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah diwajibkan untuk selalu melaporkan kegiatan operasionalnya selama satu tahun berturut-turut, dalam bentuk laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang dilaporkan harus memiliki kualitas informasi atau penyusunan yang baik. Oleh karena itu, dalam setiap wadah sektor publik baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang ada yaitu salah satunya keuangan.

Faktor pendukung ketiga yaitu dampak terhadap kualitas pelaporan

keuangan pemerintah daerah terletak pada keterbatasan sumber daya manusia. Terciptanya pengelolaan keuangan yang baik tidak bisa terlepas dari adanya sumber daya yang kompeten yang terlatih di bidang akuntansi, terlatih di bidang keuangan serta memiliki pengalaman. Menurut Rachman (2021) kompetensi sumber daya adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsinya atau tugasnya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan, menurut Hainil et al (2021) kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Suatu sistem yang tepat belum dapat berjalan sempurna jika belum didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, terutama kualitas individu sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pengalaman dan potensi pelatihan.

Untuk pengelolaan keuangan daerah yang sehat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dengan memfasilitasi pelatihan akuntansi, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di bidang keuangan. Hal ini diperlukan karena untuk menerapkan sistem akuntansi yang berlaku saat ini. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten harus mampu memahami dan menerapkan logika akuntansi. Sumber daya manusia yang tidak memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan baik akan gagal karena sumber daya manusia yang tidak terlatih, tidak terdidik, kurang pengalaman keuangan, yang akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar. ditetapkan oleh pemerintah (Mulia, 2019).

Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah mempunyai dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Sebaliknya, jika kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rendah, maka laporan

keuangan yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari model penelitian sebelumnya, yaitu variabel yang digunakan oleh Animah dkk (2020) adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel bebas yaitu *good governance*. Penambahan variabel ini karena *good governance* merupakan isu yang menarik perhatian publik kepada wadah pemerintah dalam mengelola keuangan negara guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya mempunyai tujuan objektif untuk merencanakan atau mengembangkan suatu daerah untuk mencapai bentuk keberhasilan.

Isu ini menarik untuk dikaji karena adanya fenomena penguatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan pemerintahan yang lebih baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peneliti memfokuskan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), alasannya karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalamnya

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, *Good Governance*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas

laporan keuangan?

2. Apakah terdapat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan mengenai pemahaman sistem informasi akuntansi, *good governance*, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Bekasi

Bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan penelitian ini

dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi agar konsisten dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang diberikan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik di dalam skripsi ini.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh sistem informasi akuntansi, *good governance*, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang

diteliti yaitu teori keagenan, teori *stakeholder*, kualitas laporan keuangan, indikator kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, indikator komponen sistem informasi akuntansi, *good governance*, prinsip-prinsip *good governance*, dan kompetensi sumber daya manusia, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.